

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 di revisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa telah terjadi transformasi prinsip otonomi daerah di Indonesia (Beriansyah & Mutiarin, 2015:390). Berdasarkan prinsip otonomi daerah tersebut, telah dibentuk Peraturan Walikota Yogyakarta No 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta, bahwa pada prinsipnya mewujudkan masyarakat sejahtera maka diperlukan program bersama (Perwali, 2018:1). Provinsi DIY masih menghadapi problem kemiskinan, sejak 2013-2017 danais (dana keistimewaan) telah digulirkan namun presentase angka kemiskinan cukup tinggi 13,1 atau sekitar 488,83 ribu penurunannya hanya sekitar 2% (Kariem & Purwaningsih, 2018:63).

Sebagai negara yang masih menganut *economic system* bergantung pada pembiayaan di *public sector*, maka harapannya kebijakan desentralisasi bisa mengurangi angka kemiskinan namun belum banyak terpenuhi secara signifikan (Sakir & Mutiarin, 2014:464). Pembangunan di era demokrasi dan desentralisasi, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan (Sugiarto & Mutiarin, 2017:8). Pembangunan partisipatif merupakan ciri khas negara modern, bisa menjamin kepentingan masyarakat diakomodir dan mensejahterakan rakyat secara cepat (Andi, 2017:3; Nurmandi, 2014:57). Menurut Bevir perlu adanya transformasi dalam tata pengelolaan pemerintahan dari sistem hirarki menuju jaringan dan

kemitraan, Frederickson perlu adanya aktor non negara dilibatkan dalam proses urusan dipemerintahan (Zaenuri, 2016:4).

Masyarakat sedang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin meningkat secara kompleks (Al-tabbaa et al. 2019:1). Ketidaksetaraan ekonomi meningkat dalam demokrasi di seluruh dunia dan menimbulkan ancaman yang jelas terhadap stabilitas (Dixon & Suk 2017:369). Hampir semua masalah yang kita hadapi sekarang masalah kolektif: yang lebih besar daripada diri sendiri yang membutuhkan pemahaman kolektif dan global, hanya dapat benar-benar diatasi melalui diskusi multilateral (Graham et al. 2018:2). Perlunya *collaborative governance*, orang dan organisasi melintasi batas menyelesaikan sesuatu dan tata kelola kolaboratif dimaksudkan mendorong tindakan atau hasil yang tidak mungkin dicapai oleh organisasi mana pun yang bertindak sendiri (Emerson & Nabatchi 2015:718).

Salah satu akibat kemiskinan berkurangnya efisiensi sejumlah proses ekonomi dan keterbatasan fasilitas dalam aktivitas produksi (Jared, 2017:319). Terjadinya perbedaan pendapatan akibat distribusi pendapatan disetiap kelompok masyarakat pendapatan tinggi, pendapatan rendah, jumlah penduduk dibawah (*poverty line*) dan jumlah angka pendidikan rendah. Kebutuhan pokok mengalami peningkatan harganya, jumlah angka pengangguran meningkat (Endrayani & Dewi, 2016:64, Puspita, 2015:101). Menurut Hatta (2014:63) ekonomi masyarakat Indonesia tidak individualisme tetapi pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme. Heywood (2016:100), terkait pemerataan kesejahteraan sosial, kaum liberal modern melihat manajemen

ekonomi sebagai hal yang konstruktif untuk mempromosikan kemakmuran dan harmoni di masyarakat sipil.

Salah satu cara menurunkan angka kemiskinan dengan program yang pro terhadap rakyat (Bakhtiar & Zuly, 2015:207). Peningkatan kualitas SDM masyarakat, melalui pengembangan kemampuan SDM, dengan program pelatihan *soft skill*, *hard skill* dan bermitra berbagai unsur organisasi (Pribadi & Zaenuri, 2017:33). Ada kelemahan dimasyarakat keterbatasan kemampuan memproduksi atau membuat sesuatu produk dan keterbatasan teknologi informasi (Zaenuri & Sulaksono, 2016:32). Era sekarang paradigmanya developmentalisme yang mengedepankan atau mementingkan industrialisasi dan pertumbuhan disektor ekonomi (Ramdani et al, 2018:22).

Perkembangan masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 ke tahun 2018 presentasenya mengalami penurunan angka kemiskinan;

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta 2015 – 2018

Variabel Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta			
	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Ribu Jiwa)	36	32.06	32.20	29.75

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2019

Kehadiran program Gandeng Gendong saling bahu membahu dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan melibatkan lima elemen Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas. Fokus program Gandeng Gendong memberdayakan masyarakat sesuai potensi lokal, seperti olahan kuliner, produk kerajinan dan pelatihan kuliner dibimbing langsung pihak chef dari hotel sebagai bentuk dari program CSR. (Sumber [www.starjogja.com](http://www.starjogja.com))

01 Maret 2019 pukul 20:08 WIB; [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) 01 Maret 2019 pukul 20:05 WIB; [www.tempo.co](http://www.tempo.co) 01 Maret 2019 pukul 20:02 WIB; <https://jogja.antaranews.com> 01 April 2019 pukul 16:32 WIB).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mencoba mendalami kasus di atas dengan meneliti secara lebih mendalam dengan penulisan tesis berjudul **“Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta : Studi Kasus Program Gandeng Gendong“**

## **1.2. Rumusan Masalah**

**1.2.1.** Bagaimana Tata Kelola Kolaborasi Program Gandeng-Gendong Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Yogyakarta.?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan**

1. Mengidentifikasi Bagaimana Tata Kelola Kolaborasi Program Gandeng-Gendong Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Yogyakarta

### **1.3.2. Manfaat**

1. Hasil studi diharapkan dapat berkontribusi secara positif bagi pengembangan tentang studi Kebijakan Publik dan Ilmu Pemerintahan.
2. Hasil studi diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembangunan untuk masa yang akan datang.

### **1.3.3. Publikasi**

Hasil penelitian ini telah dikembangkan menjadi dua naskah dalam proses menuju publikasi di Jurnal Terakreditasi Sinta.